



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Anggaran terhadap Kinerja APBD di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024

Nurfritri Zulaikha¹, Aura Mefi Nasywa², Ririn Setiya Ningrum³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang

E-mail: akt.malam1@gmail.com¹, auramefinsy18@gmail.com², ningrum.ririnsetiya@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received June 08, 2025

Revised June 25, 2025

Accepted June 29, 2025

Keywords:

Budget, Fluctuations, APBD Performance.

ABSTRACT

This study analyzes budget fluctuations and their impact on the performance of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of the Riau Islands Provincial Government for the 2024 fiscal year. The method used is descriptive qualitative with a case study approach, using secondary data from budget realization reports and APBD documents. The results of the study indicate that the performance of the APBD is less than optimal due to a significant increase in budget targets without being accompanied by optimal realization, especially in transfer revenues that are late and do not reach the target. This condition has caused a delay in payment of IDR 282 billion, indicating suboptimal cash management and budget planning. High dependence on central transfer funds poses a risk of budget fluctuations that have an impact on the effectiveness of the implementation of development programs. This study recommends increasing the optimization of Regional Original Revenue and accelerating program implementation so that budget realization is more equitable and efficient. These findings are important for formulating adaptive and sustainable regional financial management strategies in order to improve the quality of public services and achieve regional development goals.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 08, 2025

Revised June 25, 2025

Accepted June 29, 2025

Keywords:

Anggaran, Fluktuasi, Kinerja APBD.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fluktuasi anggaran dan dampaknya terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data sekunder dari laporan realisasi anggaran dan dokumen APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja APBD kurang maksimal akibat kenaikan target anggaran yang signifikan tanpa disertai realisasi yang optimal, terutama pada pendapatan transfer yang terlambat dan tidak mencapai target. Kondisi ini menyebabkan munculnya tunda bayar sebesar Rp282 miliar yang mengindikasikan pengelolaan kas dan perencanaan anggaran yang belum optimal. Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat menimbulkan risiko fluktuasi anggaran yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan percepatan pelaksanaan program agar realisasi anggaran lebih merata dan efisien. Temuan ini penting untuk merumuskan strategi pengelolaan keuangan daerah yang



adaptif dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nurfitri Zulaikha
STIE Pembangunan Tanjungpinang
E-mail: akt.malam1@gmail.com¹

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. APBD bukan semata menunjukkan perencanaan keuangan daerah, namun juga berfungsi sebagai pengukur kesuksesan pemerintah dalam mengelola sumber daya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan.

Kinerja APBD di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 dinilai kurang maksimal. Menurut data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), realisasi pendapatan baru mencapai Rp3,532 triliun atau 82,76 % dari target dan realisasi belanja mencapai Rp3,475 triliun atau 78,85% dari target. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengakui bahwa kondisi ini disebabkan oleh fluktuasi anggaran yang disebabkan dari sejumlah faktor baik eksternal dan internal. Fluktuasi anggaran ini disebabkan oleh penurunan pendapatan negara, ketidakstabilan ekonomi internasional dan nasional, serta komponen lain yang memengaruhi penerimaan daerah dan pelaksanaan belanja.

Selain itu, berdasarkan evaluasi APBD Perubahan Kepulauan Riau tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merekomendasikan pemangkasan anggaran sebesar Rp215 miliar. Hal ini dikarenakan target pendapatan tidak mencukupi untuk membiayai belanja yang direncanakan. Pengurangan ini terutama terfokus pada belanja yang dianggap tidak mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), seperti kegiatan fisik dan perjalanan dinas yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. (Said HM et al., 2023)

Kondisi ini memperlihatkan terdapat adanya fluktuasi anggaran yang cukup signifikan dan mempunyai potensi menyebabkan hambatan dalam efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pencapaian target kinerja APBD. Walaupun Gubernur Ansar menilai serapan anggaran secara umum masih relatif baik dan kegiatan diakhir tahun berjalan normal. Akan tetapi, ketidaksesuaian antara target dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi anggaran harus dievaluasi secara menyeluruh.

Fenomena ini menjadi sorotan penting karena dapat mempengaruhi stabilitas keuangan daerah, efektivitas penggunaan anggaran, dan pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Maka dari itu, analisis menyeluruh tentang komponen yang mempengaruhi fluktuasi anggaran dan dampaknya terhadap kinerja APBD sangat penting untuk merumuskan strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.



Tinjauan Pustaka

Anggaran

Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik (Sujarweni, 2020).

Isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran itu berbentuk suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut (Sujarweni,2020), APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggar-an APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini akan menganalisis hal-hal yang menyebabkan fluktuasi anggaran sehingga kinerja APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak maksimal. Jenis data yang digunakan adalah sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi Semester 1 2024 Pemprov Kepulauan Riau, APBD Murni Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dan APBD Perubahan Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

Hasil Dan Pembahasan

Pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pendapatan daerah Rp 4.216.352.903.217 dengan rincian Pendapatan asli daerah yang awalnya sebesar Rp 1.791.866.747.040, pendapatan transfer Rp 2.423.162.053.677, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1.324.102.500. Kemudian di Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya perubahan yang lumayan signifikan yaitu pendapatan daerah menjadi Rp 4.268.508.203.807 dan dengan rincian pendapatan asli daerah naik sebesar Rp 2.020.676.416.916, pendapatan transfer diturunkan sebesar Rp 2.243.739.086.891, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar Rp 4.092.700.000.

Uraian	Jumlah		
	Murni	Perubahan	Selisih
Pendapatan daerah	4.216.352.903.217	4.268.508.203.807	52.155.300.590
Pendapatan asli daerah (PAD)	1.791.866.747.040	2.020.676.416.916	228.809.669.876
Pajak daerah	1.545.813.725.463	1.738.323.174.655	192.509.449.192
Retribusi daerah	18.658.320.754	155.935.540.754	137.277.220.000



Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	26.500.000.000	34.003.224.423	7.503.224.423
Lain-lain PAD yang sah	200.894.700.823	92.414.477.084	(108.480.223.739)
Pendapatan transfer	2.423.162.053.677	2.243.739.086.891	(179.422.966.786)
Pendapatan transfer pemerintah pusat	2.423.162.053.677	2.243.739.086.891	(179.422.966.786)
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.324.102.500	4.092.700.000	2.768.597.500
Pendapatan hibah	1.324.102.500	4.092.700.000	2.768.597.500
Jumlah pendapatan	4.216.352.903.217	4.268.508.203.807	52.155.300.590

Tabel.1 APBD Murni dan Perubahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Kenaikan target pada APBD Perubahan tersebut tidak diimbangi dengan realisasi pendapatan dan belanja yang optimal sehingga menjadikan kinerja APBD di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 kurang maksimal. Pada data realisasi semester I tahun anggaran 2024 menunjukkan bahwa hingga 30 Juni 2024, realisasi pendapatan baru mencapai Rp1,7 triliun atau sekitar 41,74% dari total anggaran pendapatan.

Di sisi lain, jumlah PAD menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dengan realisasi. Namun, meskipun PAD cukup progresif, keterlambatan dana transfer pusat sangat mempengaruhi arus kas daerah. Ketimpangan antara pendapatan dan belanja semakin nyata ketika belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp1,6 triliun atau 36,93% dari anggaran

Komponen yang paling lambat realisasinya adalah pendapatan transfer yang baru mencapai 37,75% dari target. Walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian yang cukup baik, ketergantungan pada dana transfer pusat yang tidak terealisasi dengan baik menyebabkan tekanan pada kas daerah. Hal ini dapat berpengaruh langsung pada kurang optimalnya realisasi pendapatan dan belanja daerah. Kondisi ini juga dapat menyebabkan sejumlah kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami tunda bayar karena dana yang dibutuhkan untuk pembayaran belum tersedia. Ketergantungan yang cukup besar pada dana transfer pusat membuat APBD Provinsi Kepulauan Riau rentan terhadap fluktuasi dan keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat.

Dari sisi belanja, capaian belanja operasional sebesar 37,75% dan belanja modal sebesar 12,70% menunjukkan bahwa inisiatif prioritas pemerintah masih berjalan meskipun penerimaan belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap melakukan belanja sesuai rencana kerja tahunan, namun mengalami kendala likuiditas karena penerimaan daerah yang belum memadai. Kendala dalam realisasi belanja juga akan berdampak pada munculnya tunda bayar yang merupakan indikasi kurang optimalnya pengelolaan kas daerah dan prioritas belanja

Tunda bayar yang dialami Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp 282 miliar. Kondisi ini secara langsung memengaruhi kinerja APBD yang kurang maksimal. Tunda bayar menyebabkan sejumlah kegiatan pembangunan dan pelayanan publik tertunda pembayarannya. Tunda bayar merupakan salah satu indikator defisit struktural yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Ketika pengeluaran terus berlanjut tanpa adanya pendapatan yang diharapkan, pemerintah harus menunda pembayaran kepada pihak eksternal atau mereka yang melaksanakan proyek. Hal ini tidak hanya memengaruhi kepercayaan mitra dan pelaksanaan proyek, tetapi juga menunjukkan buruknya pengelolaan kas dan perencanaan anggaran. Jika kondisi ini terus berlanjut setiap tahun, tunda bayar dapat muncul sebagai faktor utama dalam defisit anggaran yang mendasarinya. Defisit muncul tidak hanya dari



kesenjangan antara pengeluaran dan pendapatan secara keseluruhan, tetapi juga dari ketidaksesuaian waktu penerimaan dan pengeluaran, yang menyebabkan kekurangan kas sementara. Dengan demikian, mengatasi masalah tunda bayar memerlukan strategi, yang melibatkan peningkatan kemampuan keuangan daerah, memaksimalkan pendapatan yang mungkin, dan mereformasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Kesimpulan

Kinerja APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2024 kurang maksimal disebabkan oleh fluktuasi anggaran yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kenaikan target APBD yang terlalu signifikan tanpa mengetahui apakah akan tercapai realisasinya.
2. Realisasi tidak mencapai target anggaran, seperti pendapatan transfer yang menyebabkan juga dapat menyebabkan sejumlah kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami tunda bayar.
3. Tunda bayar yang muncul dari gap antara target dan realisasi serta pengelolaan prioritas belanja yang belum optimal menjadi indikator langsung dari kurang optimalnya pengelolaan arus kas dan perencanaan anggaran.

Saran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu mengurangi ketergantungannya pada dana transfer pusat dengan meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah provinsi harus meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah dan meningkatkan kapasitas instansi penghasil PAD. Pemerintah provinsi Kepulauan Riau juga harus mempercepat pelaksanaan program dan pemanfaatan anggaran untuk mencegah penumpukan realisasi pendapatan dan belanja pada triwulan terakhir, yang akan mengurangi kemungkinan keterlambatan pembayaran dan meningkatkan efisiensi alokasi anggaran.

Daftar Pustaka

- Said HM, Budiandriani, Suriyanti, & Firman. (2023). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan BPKAD Kabupaten Pinrang)*. 6(2).
- Sujarweni, V. W. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.